



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 932/II/XI/2016

**Papua Perlu  
Mendapat Perhatian Khusus**

**Fanatisme Pilkada  
Rawan Konflik**

**Peringatan  
Hari Sumpah Pemuda  
di Komplek Parlemen**



**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan

# Papua Perlu Mendapat Perhatian Khusus

Komisi X DPR RI melihat, Papua harus mendapat perhatian khusus dalam beberapa bidang. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, khusus untuk bidang pendidikan, perlu adanya komunikasi intensif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, agar penyaluran anggaran maupun bantuan, lebih tepat sasaran.

Demikian diungkapkannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Jayapura, Provinsi Papua, Senin (31/10). Dalam kesempatan itu, Tim Kunker Komisi X DPR RI mendapat aspirasi dari pihak SMA 5 Jayapura, terkait bantuan dari Pemerintah Pusat. SMA 5 Jayapura meminta agar ruang kelas direvitalisasi, namun malah mendapat Ruang Kelas Baru (RKB).

"Untuk permasalahan di SMA Negeri 5 Jayapura yang meminta revitalisasi gedung, namun pendapatnya malah RKB, mungkin karena keterbatasan anggaran di Kemendikbud atau anggaran yang ada hanya RKB. Namun kalau menghancurkan ruang kelas yang ada, ini tidak sesuai dengan nomenklturnya," kata Fikri.

Fikri juga mengaku heran. Di satu sisi ruang kelas sekolah masih minim, dan sekolah hanya meminta bantuan untuk revitalisasi gedung, kemudian malah mendapat bantuan RKB. Sehingga, bangunan ruang yang sudah ada, kemudian dihancurkan untuk dibangun RKB.

Fikri meminta agar komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat lebih intensif. Kemudian, perlu adanya bimbingan teknis yang ketat sehingga tidak ada kesalahan pengajuan bantuan dari Pemda ke Pusat.

"Tidak boleh dibiarkan kemudian Kemendikbud dinyatakan salah karena tidak sesuai dengan nomenklatur," imbuh politisi F-PPKS itu.

Sementara terkait aspirasi masih minimnya sarana dan prasarana, khususnya komputer, di SMA YPPK Taruna Dharma, SMK 1 Jayapura maupun SMA 5 Jayapura, Fikri mengaku hal itu sudah seringkali disampaikan Komisi X kepada Mendikbud, saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat.



*Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau YPPK Taruna Dharma*

"Ini sudah berulang-ulang disampaikan saat raker atau RDP, supaya diperhatikan. Karena ketika konteksnya adalah untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), ini rawan, kalau soalnya berbeda tapi bergantian, ini rawan disampaikan dari murid yang sudah ujian duluan ke yang baru akan menjalankan ujian," khawatir politisi asal dapil Jateng itu.

Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI MY Esty Wijayati mengatakan, permasalahan yang masih dijumpai di Papua adalah minimnya sarana dan prasarana, baik itu ruang kelas, sarana laboratorium, maupun peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan di sekolah.

"Ini hampir di seluruh Papua. Tapi persoalan yang harus segera diatasi, adalah sarana dan prasarana sekolah di pelosok Papua. Dengan sebaran penduduk yang kadang satu desa hanya 10 KK, kemudian jarak 5 km lagi baru ada penduduk desa lain," kata politisi F-PDI Perjuangan itu.

Politisi asal dapil DI Yogyakarta itu melihat persoalan di Papua sangatlah kompleks. Sehingga dalam memperlakukan dan membuat kebijakan untuk Papua tidak bisa disamakan dengan membuat kebijakan untuk daerah-daerah

lain.

Sebelumnya, Kepala Sekolah SMA 5 Jayapura, Agnes, mengatakan sekolahnya membutuhkan beberapa bantuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, misalnya minim jumlah bis sekolah untuk antar jemput siswa dan guru, termasuk minimnya jumlah komputer. Ia juga mengeluhkan ruang kelas yang seharusnya cukup

direvitalisasi, namun malah mendapat RKB.

Selain mengunjungi tiga sekolah tingkat menengah atas, Komisi X juga menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua beserta jajaran, dan ekonomi kreatif di Jayapura, Papua.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya (F-PD/dapil Aceh) dan Anggota Komisi X DPR RI dari F-PDI Perjuangan yakni Asdy Narang (dapil Kalteng), Sofyan Tan (dapil Sumut) dan SB Wiryanti Sukamdani (dapil DKI Jakarta).

Kemudian Bambang Sutrisno (F-PG/dapil Jateng) dan Noor Achmad (F-PG/dapil Jateng). Kemudian dari Fraksi Partai Gerindra yakni Dwita Ria (dapil Lampung), dan Sri Meliyana, (dapil Sumsel).

Berikutnya Edhie Baskoro Yudhoyono (F-PD/dapil Jatim), Rinto Subekti (F-PD/dapil Jateng). Kemudian dari F-PAN ada Laila Istiana (dapil Jateng), dan Yayuk Basuki (dapil Jateng). Kemudian dari F-PKB Lathifah Shohib (dapil Jatim), SY. Anas Thahir (F-PPP/dapil Jatim), Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem/dapil Jatim), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura/dapil Jabar). ■

## Semua Pihak Diminta Menahan Diri, Hindari Pernyataan yang Picu Ketegangan

Situasi politik di Indonesia khususnya Jakarta jelang pelaksanaan pilkada serentak tahap kedua semakin mengkhawatirkan. Apalagi, pasca pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait Surah Al-Maidah ayat 51 yang memicu kontroversi khususnya di kalangan umat Islam.

**M**elihat situasi politik yang semakin mengkhawatirkan tersebut, Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta semua pihak untuk menahan diri. Elit-elit politik diminta untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru memicu ketegangan di masyarakat.

"Pernyataan-pernyataan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat harus dihindari. Sebaliknya, tokoh-tokoh politik harus memberikan pernyataan yang menciptakan kedamaian. Perlu kebijaksanaan dan perhatian yang sangat serius dari pemimpin bangsa saat ini. Pemimpin bangsa harus akur," ujar Akom, sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat, (28/10).

Menurut politisi Golkar tersebut, elit-elit politik harus ikut bertanggungjawab menjaga kedamaian dan ketenangan di masyarakat. Apalagi saat ini, aksi demonstrasi menuntut Ahok untuk diproses hukum oleh kepolisian terus terjadi di berbagai daerah.



Ketua DPR RI Ade Komarudin

Menurutnya, bukan tidak mungkin, aksi demonstrasi warga semakin tidak terkendali.

"Situasi ini mulai mengkhawatirkan bila melihat sebaran demonstrasi masyarakat. Saya takut ada ormas yang anggotanya yang diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu dan masuk skema sebagai "martir" yang bertujuan membuat negara semakin tidak terkendali," tambahnya.

Tambahan lagi, Akom berpesan untuk tokoh-tokoh yang bertarung dalam

Pilkada untuk tidak menggunakan isu SARA dalam kampanye. "Pak Ahok juga harus belajar dari peristiwa ini. Setiap kandidat harus menjaga jangan sampai kampanye pakai SARA. Yang mayoritas mengayomi yang minoritas, yang minoritas menghormati yang mayoritas. Isu-isu agama tidak boleh dijadikan komoditas politik. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini sama-sama. Jangan sampai gara-gara Pilkada keutuhan negeri ini terganggu," jelas Akom.

Akom pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali menjadikan Pancasila sebagai pedoman bernegara. Dengan demikian, nilai-nilai toleransi lebih diutamakan dibanding isu-isu berbau SARA.

"Isu SARA ini pasti akan terus ada di dunia ini. Isu ini yang harus kita hindari. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Walaupun beraneka ragam agama harus tetap bersatu," tutup Akom. ■

(bump), Foto: Jayadi/br

**BULETIN PARLEMETARIA**



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN** Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) [ ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN ]**

## Fadli Zon Terima Kunjungan Pengurus Paski Jabar

Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon menerima kunjungan pengurus Paski (Persatuan Seniman Komedi Indonesia) Jawa Barat, yang di pimpin oleh Komedian Komeng.

**K**edatangan pengurus Paski tersebut untuk memberikan laporan hasil musyawarah daerah (musda) yang telah dilakukan kepada Fadli Zon selaku Penasehat Paski Jabar.

"Saya merasa senang atas permintaan rekan-rekan Paski Jabar, yang meminta saya untuk kembali menjadi Penasehat di Paski Jabar. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bang Komeng, yang terpilih lagi menjadi Ketua Paski Jawa Barat untuk periode kedua," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (02/11).



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon

Fadli juga mengatakan, seniman komedi merupakan orang-orang yang mempunyai pahala yang banyak, karena selalu membuat orang tertawa. Paski adalah persatuan seniman komedi yang punya cabang dibanyak

provinsi, dan Jawa Barat menjadi salah satu yang terbesar.

"Mudah-mudahan Paski Jabar nantinya dapat terus membuat program-program yang bisa memajukan seniman komedi di Jawa Barat, serta ikut memajukan seni komedi di Indonesia. Bergabung dengan Paski menjadi satu silaturahmi tersendiri bagi saya, karena dapat membuat

kita sering tertawa. Tertawa itu sehat, dan tertawa menjadi sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan akhir-akhir ini," pungkasnya. ■

(dap), foto : kresna/hr

## DPR RI Dukung Transisi Demokrasi Uzbekistan

Indonesia harus memberikan dukungan kepada negara-negara dikawasan Asia Tengah untuk dapat menjadi alternatif kawasan yang damai, tenteram, dan sukses.

Sebab di tempat lain, seperti negara-negara Timur Tengah, cenderung mengalami tren kegagalan.

**D**emikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah usai menerima kunjungan Duta Besar negara Uzbekistan Shavkat Jamalov, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/10).

"Negara di wilayah Asia Tengah bisa kita bantu menjadi kawasan yang sukses, Indonesia harus punya pandangan terhadap hal ini. Saya memberikan *support* dan semangat kepada Duta Besar Uzbekistan, DPR RI sangat mendukung transisi demokrasi mereka. Sebab kita juga

pernah mengalami pengalaman masa transisi seperti mereka," ujar Fahri.

Menurutnya, penting bagi Indonesia untuk punya pemahaman yang baik tentang Asia Tengah, terutama Uzbekistan dan kota-kota pentingnya yang terkenal dalam sejarah, supaya tidak mempunyai perspektif yang sempit tentang agama dan ilmu pengetahuan.

"Kadang kita berfikir sempit akibat pengetahuan sejarah yang dimiliki juga sempit. Saya harapkan mudah-mudahan Uzbekistan bisa sukses menjadi negara demokrasi yang

maju, sehingga rakyatnya dapat hidup dalam keadaan damai, merdeka, dan makmur, serta dapat menikmati hasil pembangunan yang telah mereka lakukan," ucapnya.

Fahri juga mengatakan, Indonesia perlu punya perhatian yang baik kepada negara di kawasan Asia Tengah, karena Asia Tengah merupakan wilayah yang dahulunya jarang disebut, akibat tenggelam dibawah dominasi Uni Soviet. Sekarang setelah 25 tahun pasca runtuhnya Uni Soviet, Asia Tengah telah tumbuh menjadi negara-negara

yang independen.

Salah satu hal yang menarik adalah karena semua penduduk Uzbekistan mayoritas muslim, lanjutnya, dalam sejarahnya Asia tengah merupakan simbol dari puncak-puncak kemajuan ilmu pengetahuan dan sains. Sehingga saintis generasi awal terutama dikalangan ulama Islam, seperti Imam Bukhari dan lain sebagainya, adalah berasal dari kawasan tersebut.

"Saya mendapatkan undangan resmi dari Ketua KPU

Uzbekistan, untuk menjadi peninjau didalam pelaksanaan pemilu Presiden, setelah wafatnya Presiden pertama Uzbekistan. Karena sejak mendapatkan kemerdekaan pasca runtuhnya negara Uni Soviet pada tahun 1991, selama kurun waktu 25 tahun yang memimpin adalah Presiden pertamanya. Mereka meminta saya untuk menjadi delegasi yang menyaksikan pemilu Presiden mereka," pungkas Fahri. ■

(dop), Foto: Rami/hr



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra,  
Fabri Hamzah

## Fadli Zon Terima Aspirasi Pedagang Ciawi

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon menerima aduan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Pasar Ciawi, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi, bahwa tiga bulan belakangan ini mereka kehilangan tempat berjualan, lantaran dampak penertiban dari pemerintah setempat. Yang disayangkan dari penertiban ini tidak memberikan tempat pengganti untuk para pedagang yang hanya menggantungkan pendapatan dari berjualan.

**P**ara pedagang meminta kepada Fadli agar bisa menggunakan lahan yang tidak terpakai di sekitar perempatan Ciawi, yang menurut mereka dimiliki oleh Bina Marga atau Kementerian Pekerjaan Umum. Menanggapi pengaduan tersebut Fadli mengatakan, penertiban harus dibarengi solusi, karena pedagang yang kehilangan pekerjaan bisa menambah masalah baru.

"Saya kira penertiban itu perlu, tetapi harus ada solusi juga. Mereka mencari lahan yang belum termanfaatkan puluhan tahun, ingin dijadikan lokasi mereka sementara bisa berjualan bisa berdagang. Saya kira semangat pedagang kaki lima ini kan mencari pekerjaan, di tengah kehidupan yang makin sulit," jelas Fadli di ruang kerjanya Nusantara III, Senin (31/10).

Para pedagang yang kehilangan tempat berjualan ini berjumlah 280 orang, terdiri dari penjual pakaian, sepatu, makanan ringan, dan lain sebagainya. Mereka menyadari, berjualan di bahu jalan adalah kesalahan, namun yang diharapkan setelah penertiban bukanlah mencampakkan tetapi pembinaan dari



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama para Pedagang Ciawi

pemerintah. "Kami masih terkatung-katung, kami meminta solusi ke bapak," keluh salah seorang perwakilan.

Fadli akan mengupayakan, apa yang diharapkan para pedagang, agar mereka bisa berjualan lagi mencari nafkah. "Tentu saya harus menyampaikan aspirasi ini kepada pihak pemilik lahan. Kalau lahan itu milik PU atau milik institusi

lain, nanti kita mintakan supaya dijadikan tempat untuk penampungan mereka," ujar Fadli.

Delapan orang perwakilan pedagang yang datang menyampaikan keluhan ke Fadli ini pun menyampaikan, jika diizinkan menggunakan lahan yang dimaksud, mereka bersedia membayar uang sewa sesuai dengan kemampuan mereka. ■

(eko) Foto: Andri/hr

## DPR RI Apresiasi Keberhasilan Amnesti Pajak dan Pemberantasan Pungli

Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi keberhasilan program amnesti pajak yang dilakukan Pemerintah yang mencapai target pada tahap pertama. Apresiasi juga diberikan atas langkah Pemerintah dalam memberantas pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan publik.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto saat membacakan Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (28/10). DPR RI akan memasuki masa reses pada 29 Oktober 2016, dan akan berakhir 15 November 2016.

"DPR RI mengapresiasi keberhasilan program amnesti pajak yang dapat mencapai target pada tahap pertama, dan diharapkan untuk ditingkatkan pada tahap berikutnya dengan lebih mengutamakan dana repatriasi yang lebih besar," harap Agus Hermanto.

Selain itu, masih kata Agus, atas langkah Pemerintah dalam memberantas pungli yang selama ini menjadi pelayanan publik, DPR RI mengapresiasi upaya tersebut guna menegakkan disiplin dan menumbuhkan budaya melayani masyarakat tanpa pamrih.

"Diharapkan Pemerintah dapat tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang,  
Agus Hermanto

tersebut," pesan politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Dia mengungkapkan, terkait dilaksanakannya Pilkada Serentak Tahun 2017 di 101 daerah, yaitu 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota yang saat ini telah memasuki tahapan penetapan calon, DPR RI mengimbau kepada para kontestan, tim sukses, dan pendukungnya agar mengedepankan persatuan dan kesatuan

bangsa.

"Yakni dengan melakukan kampanye damai dan santun, serta lebih memfokuskan pada visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan daripada isu SARA dan pembunuhan karakter terhadap individu dalam berkampanye," pesan Agus.

Masih dalam kesempatan yang sama, dia memaparkan peran diplomasi parlemen yang telah dilaksanakan DPR RI selama Masa Sidang I. DPR RI telah mengirimkan beberapa delegasi ke berbagai sidang dan konferensi kerjasama organisasi regional, diantaranya sidang ke-8 AIPA Caucus, ASEAN-AIPA *Interface Meeting*, APA *Executive Council Meeting* dan Sidang Umum ke-37 AIPA.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, DPR RI juga telah mengirim delegasi untuk menghadiri kegiatan kerja sama organisasi internasional, diantaranya Sidang *Global Green Growth Week 2016*, *Parliamentary Session within the Framework for the Annual WTO Public Forum*, hingga MENA OECD. ■

(g/f), Foto: Jaka/br

## Diplomasi DPR RI Tingkatkan Kerjasama Indonesia-Armenia

DPR RI menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Armenia Edward Nalbandian di ruang tamu Pimpinan DPR RI, Nusantara III, Selasa (1/11). Penyambutan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi Wakil Ketua BKSAP Tantowi Yahya dan Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais.

Menjalankan fungsi diplomasi parlemen, dalam pertemuan dibicarakan tentang peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Armenia di bidang teknologi. "Armenia ini unggul di bidang teknologi, sehingga sangat bagus kalau kita juga menjalin hubungan dengan Armenia, wabil khusus tentang teknologi, karena dia memang punya keunggulan di bidang

*engineering*," papar Agus.

Agus juga mengakui, Armenia punya keunggulan dalam produksi alat berat, persenjataan dan sejenisnya. Dia juga mengungkapkan antara Indonesia dan Armenia sudah melakukan beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU) di antaranya dalam sektor perekonomian. Sedangkan di bidang perdagangan Politisi dari Fraksi Demokrat ini

berkehendak ingin meningkatkan hal itu.

"Bahkan sudah ada MoU-MoU antara Indonesia dan Armenia. Tentunya MoU itu harus ditindak lanjuti. Seperti MoU di dalam peningkatan ekonomi. Kita harus meningkatkan neraca perdagangan antara Indonesia dan Armenia," jelas Agus.

Tantowi yang turut menyertai



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto menerima Menlu Armenia

Wakil Ketua DPR RI ini juga sependapat bahwa Armenia unggul dalam sektor teknologi, dia juga mengusulkan agar kedua negara menjalin hubungan di bidang olahraga, *turisme, kebudayaan, information and technology* dan sebagainya. "Armenia adalah mitra penting dalam teknologi," ujar

Tantowi.

Bahkan sebelumnya Agus menyampaikan antara Indonesia dan Armenia akan melakukan pertukaran kebudayaan. "Kita ada tukar-menukar tentang kebudayaan, juga MoU tentang ilmu pengetahuan dan teknologi," tambahnya.

Di akhir pertemuan Agus mengatakan, pada intinya Armenia dan Indonesia akan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. "Menteri luar negeri juga mengundang kami untuk berkunjung ke Armenia. Kami juga mengharapkan Parlemen Armenia bisa berkunjung ke Indonesia, bisa diagendakan tahun depan," jelasnya. ■

(foto), Foto: Jayadi/br

## Pertemuan Jokowi-Prabowo Diapresiasi

Dua tokoh politik besar bertemu. Inilah pertemuan Jokowi dan Prabowo yang diapresiasi publik, termasuk oleh para politisi di DPR RI. Pertemuan tersebut penting untuk mencairkan suasana sekaligus sebagai bentuk kematangan berpolitik.

**D**emikian mengemukakan dalam diskusi mingguan Dialektika Demokrasi bertajuk "Memaknai Pertemuan Jokowi-Prabowo" di Media Center DPR RI, Selasa (1/11). Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Anggota DPR RI Maruarar Sirait, dan dua pengamat politik



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi sejumlah Anggota DPR RI dan dua pengamat politik dalam diskusi Dialektika Demokrasi

Ahmad Bagja serta Sirajuddin. Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar melihat, Presiden Jokowi yang menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, merupakan bentuk kenegarawanannya. Ini patut diapresiasi, Karena Jokowi datang dengan penuh rendah hati walau dulu sempat terjadi rivalitas yang sangat kuat.

"Ini pertemuan dua tokoh besar dan patut diteladani. Ada perbedaan dibicarakan bersama. Ini harus dicontoh

para politisi lainnya. Saya sambut gembira pertemuan tersebut," nilai Novanto. Hal senada disampaikan pula Fadli Zon. Katanya, ini pertemuan yang perlu disambut positif, karena bagian dari membangun bangsa ke depan. Namun, politisi Gerindra ini mengingatkan Jokowi, agar pertemuannya dengan Prabowo tidak sekadar dilatari suatu masalah.

"Sebagai peristiwa politik, pertemuan itu sangat baik. Tapi, jangan karena ada masalah baru mau ketemu Prabowo," ucap

Fadli. Perlu ada pertemuan yang lebih sejati, tanpa dipicu masalah apapun. Dengan begitu, persaudaraan dan persahabatan sebagai anak bangsa tetap terjaga. Sementara Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait, mengatakan, Jokowi dan Prabowo tahu betul kapan waktunya berbeda pandangan dan kapan waktunya bersahabat.

Pertemuan itu, sambung Maruarar, sangat efektif mendinginkan tensi politik dalam negeri. "Ini bagian dari budaya politik yang positif," katanya. Rakyat Indonesia ingin kehidupan damai. Dan pertemuan dua tokoh politik itu sangat membantu mewujudkan kedamaian di Tanah Air. ■

(mb), Foto: Andri/br

# Parlemen Sebagai Jembatan Aspirasi Publik Mencegah Konflik

Pemajuan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) baik di level nasional maupun global adalah salah satu upaya kunci untuk mencegah konflik. Beragam tragedi kemanusiaan yang saat ini terjadi baik atas munculnya pertikaian, pengungsian yang ditolak berlindung dari kekejaman konflik di negaranya, tingginya intoleransi yang memicu perpecahan, kesemuanya merupakan bentuk pelanggaran HAM.

**W**akil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengusulkan agar parlemen berperan menjadi jembatan untuk menerima aspirasi publik guna mencegah terjadinya konflik. Ini sebagai bentuk pengutamaan HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Gagasan itu dia kemukakan di hadapan anggota parlemen dari seluruh dunia pada sesi Paripurna saat IPU ke-135, Selasa (25/10), di Geneva, Switzerland.

"Kunci untuk mengatasinya adalah dengan membentuk mekanisme dan tahapan-tahapan untuk terlibat dan mengatasi pelanggaran HAM sejak dini. Dan ini bisa dilakukan oleh Parlemen sebagai jembatan aspirasi publik dan yang menerima keluhan mereka," tandas Fadli, dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (31/10).

Sesi Paripurna IPU kali ini mengangkat tema utama 'Human Rights Abuses as Precursors of Conflict: Parliaments as Early Responder.' Politisi dari Partai Gerindra itu lantas memaparkan beragam upaya Indonesia untuk memajukan HAM dalam upaya pencegahan konflik.

Ia menguraikan transformasi politik Indonesia pada 1998 menuntut seluruh elemen politik termasuk DPR RI untuk melakukan perubahan mendasar pada konstitusi. "Termasuk dengan memasukkan aspek HAM kedalam UUD 1945 sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan HAM tertinggi oleh negara," jelas Fadli.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini berbagi kisah mengenai upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen inti HAM internasional, dua protokol tambahan dari konvensi hak anak, dan semua instrumen inti HAM dari ILO.

Di level nasional, DPR RI telah mengesahkan UU yang melandasi pewujudan HAM, pembentukan Komnas

HAM sebagai *National Human Rights Institution* (NHRI), hingga Pengadilan HAM yang khusus menangani pelanggaran HAM berat yakni Genosida dan kejahatan kemanusiaan.

"Pengadilan HAM bahkan tidak kenal kadaluarsa kasus. Untuk kasus HAM yang terjadi sebelum diundangkan, bisa dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc lewat rekomendasi DPR RI," urai Fadli.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya pada pelanggaran HAM seperti intoleransi, diskriminasi hingga kesewenang-wenangan penguasa. Hal-hal demikian dapat mendorong terjadinya konflik, mengubah masyarakat damai menjadi musuh seketika.

"Adalah mutlak kemudian untuk tidak memberi tempat, dimanapun di dunia ini, bagi munculnya intoleransi dan diskriminasi berbasis ras, agama, keyakinan dan pendapat. Tidak pula kemudian ada justifikasi bahwa penguasa bisa sewenang-wenang," tegas Fadli.

DPR RI menangkap potensi bila hal demikian terjadi akan merembet menjadi konflik sosial. UU Penanganan Konflik Sosial telah disahkan dengan tujuan menyelesaikan konflik dengan pendekatan berbasis HAM.

Lebih jauh ia menyoroti perlunya PBB dan Dewan Keamanan bertindak secara responsif, tepat dan segera dalam



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon

penyelesaian konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Palestina, Suriah dan lain sebagainya. "Konflik itu adalah pelanggaran HAM. Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian konflik dapat terjadi bila pemajuan HAM dilakukan secara universal berdasar prinsip obyektif, imparialitas, tidak memilah-milah, dan tidak berstandar ganda atau pun dipolitisasi," tegasnya.

Fadli juga mengapresiasi inisiasi Sekjen PBB bertajuk *Human Rights Up Front Initiative* untuk pengarusutamaan HAM di badan-badan PBB dan berkomitmen untuk mengedepankan HAM dalam beragam kerja DPR RI. ■

(BKSAP/eko), Foto: dok.BKSAP/br

## Penggunaan Dana Desa Harus Transparan, Akuntabel dan Sejahterakan Rakyat

Penyaluran dana desa yang mencapai ratusan juta harus digunakan secara terbuka, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

**H**al tersebut dikemukakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Muhidin M Sa'id usai meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (2/11). Lebih lanjut Muhidin menekankan



Tim Kunker Komisi V DPR RI



# Maksimalkan Peran dan Fungsi DPR RI Sesuai Amanah Konstitusi

Dengan semangat untuk terus berbenah sesuai dengan masukan dan kehendak rakyat, Pimpinan DPR RI mengajak seluruh anggota Dewan untuk memaksimalkan peran dan fungsinya sesuai dengan yang diamanahkan oleh konstitusi. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat membacakan pidato penutupan Masa Sidang I tahun Sidang 2016-2017 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jum'at (28/10).

“ Dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama Masa Sidang I, DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan 7 RUU, yaitu RUU tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention 2006*, RUU tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015, RUU tentang APBN 2017, RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, dan RUU tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” ucap Agus Hermanto.

DPR RI juga telah menyetujui RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR RI tentang Jabatan Hakim menjadi RUU usul DPR RI yang akan dibahas lebih lanjut dengan Pemerintah. "DPR RI baru saja menerima

pentingnya melibatkan semua elemen masyarakat, Pendamping Desa serta Dewan Pengawas Desa agar tidak ada masalah yang timbul dikemudian hari terkait pemanfaatan dana desa tersebut. "Jangan sampai gontok-gontokan, libatkan semua unsur masyarakat desa dengan tata kelola keuangan yang baik," pesan Muhidin dalam sambutannya.

Politisi Golkar ini juga mengapresiasi upaya Kepala Desa Toapaya yang memanfaatkan dana desa untuk menumbuhkan sentra ekonomi dengan membangun kios-kios dibawah tata kelola BUMDes.

"Menurut laporan aparat desa dan pihak terkait, kondisi jalan desa dan infrastruktur lainnya sudah cukup baik sehingga mereka menfokuskan dana desa untuk membangkitkan perekonomian desa," ungkap



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berpidato dalam sidang paripurna DPR RI

2 RUU yang akan diajukan oleh Pemerintah, yaitu RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dan RUU tentang Kepala Kepolisian. Kedua RUU ini akan segera dibahas bersama Pemerintah pada masa sidang yang akan datang," paparnya.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Muhidin.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti yang menginginkan pengelolaan BUMDes secara profesional dan transparan serta bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat desa.

Politisi Gerindra ini bahkan mengkritisi penggunaan dana desa untuk BUMDes sebesar 450jt atau 60 persen dari total alokasi yang mencapai 750 juta. Karena menurutnya penyertaan modal BUMDes itu sudah ada aturannya tersendiri dan maksimal hanya 50 juta.

Sementara itu, Kades Toapaya Selatan Suhendra menyebutkan, ada 13 unit kios telah dibangun dengan menggunakan dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. ■

lanjutnya, pada masa sidang kali ini DPR RI bersama Pemerintah telah membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun anggaran 2015 dan RUU tentang APBN Tahun anggaran 2017.

"DPR RI dan Pemerintah memiliki komitmen bersama untuk menciptakan *clean and good governance* dalam setiap proses penetapan dan pelaksanaan APBN. Kita berharap pemerintah dapat mengelola keuangan negara secara efektif sesuai dengan prioritas pembangunan yang menyentuhkan langsung pada pemenuhan hajat hidup rakyat Indonesia menuju sejahtera," tegasnya.

Sedangkan dari segi fungsi pengawasan, DPR RI telah menyelesaikan proses pembahasan dalam rangka

pemberian pertimbangan atau persetujuan terhadap pejabat-pejabat publik melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Calon Kepala BIN, dan Calon Anggota BPK RI. Selain itu DPR RI akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung di masa sidang mendatang.

"DPR RI memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat. Kita juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016 yang lebih baik dari tahun sebelumnya," jelasnya.

Menurutnya, DPR RI melalui Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan akan melakukan pengawasan terhadap masalah pengelolaan pembangunan ekonomi, sosial, dan keamanan di daerah perbatasan agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. ■

## Pentingnya Pemajuan HAM untuk Cegah Konflik

Pemajuan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) baik di level nasional maupun global menjadi salah satu upaya kunci untuk mencegah konflik. Beragam tragedi kemanusiaan yang saat ini terjadi baik atas munculnya konflik, pengungsi yang ditolak berlindung dari kekejaman konflik di negaranya, hingga tingginya intoleransi yang memicu perpecahan, merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di hadapan anggota parlemen dari seluruh dunia pada sesi Paripurna dari IPU ke-135, bertema *Human Rights Abuses as Precursors of Conflict: Parliaments as Early Responder*, di Geneva, Switzerland, Selasa (25/10).

"Kunci untuk mengatasinya adalah dengan membentuk mekanisme dan tahapan-tahapan untuk terlibat dan mengatasi pelanggaran HAM sejak dini. Dan ini bisa dilakukan oleh Parlemen sebagai jembatan aspirasi publik dan yang menerima keluhan mereka," tegas Fadli.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga memaparkan beragam upaya Indonesia untuk memajukan HAM dalam upaya pencegahan konflik. Ia menguraikan transformasi politik Indonesia pada 1998 menuntut seluruh elemen politik termasuk DPR untuk melakukan perubahan mendasar pada konstitusi.

"Termasuk dengan memasukkan aspek HAM ke dalam UUD 1945 sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan HAM tertinggi oleh negara," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini juga sempat berbagi kisah mengenai upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen inti HAM internasional, dua protokol tambahan dari konvensi hak anak, dan semua instrumen inti HAM dari ILO.

Untuk di level nasional, jelas Fadli, DPR telah mengesahkan UU yang melandasi pewujudan HAM, pembentukan Komnas HAM sebagai National Human Rights Institution (NHRI), hingga Pengadilan HAM yang khusus menangani pelanggaran HAM berat yakni Genosida dan kejahatan kemanusiaan.

"Pengadilan HAM bahkan tidak kenal



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

kadaluwarsa kasus. Untuk kasus HAM yang terjadi sebelum diundangkan, bisa dibentuk Pengadilan HAM *Ad Hoc* lewat Rekomendasi DPR," jelas Fadli.

Lebih jauh Fadli mengungkapkan keprihatinannya pada pelanggaran HAM seperti intoleransi, diskriminasi hingga kesewenang-wenangan penguasa. Hal-hal demikian dapat mendorong terjadinya konflik, mengubah masyarakat damai menjadi musuh seketika.

"Adalah mutlak kemudian untuk tidak memberi tempat, dimanapun di dunia ini, bagi munculnya intoleransi dan diskriminasi berbasis ras, agama, keyakinan dan pendapat. Tidak pula kemudian ada

justifikasi bahwa penguasa bisa sewenang-wenang," tegas Fadli.

Fadli memastikan, pihaknya menangkap potensi bila hal demikian terjadi akan merembet menjadi konflik sosial. UU Penanganan Konflik Sosial telah disahkan dengan tujuan menyelesaikan konflik dengan pendekatan berbasis HAM.

Lebih jauh ia menyoroti perlunya PBB dan Dewan Keamanan bertindak secara responsif, tepat dan segera dalam penyelesaian konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Palestina, Suriah dan lain sebagainya.

"Konflik itu adalah pelanggaran HAM. Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian konflik dapat terjadi bila pemajuan HAM dilakukan secara universal berdasar prinsip obyektif, imparialitas, tidak memilah-milah, dan tidak berstandar ganda ataupun dipolitisasi," tandas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Dalam kesempatan itu ia juga mengapresiasi inisiasi Sekjen PBB bertajuk *Human Rights Up Front Initiative* untuk pengarusutamaan HAM di badan-badan PBB dan berkomitmen untuk mengarusutamakan HAM dalam beragam kerja DPR RI. ■

(BKS/Asfj), Foto: Naufrojri/br

## DPR RI Sahkan Keanggotaan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu

Rapat Paripurna DPR RI penutupan Masa Sidang 1 tahun 2016-2017 pada Jumat, (28/10) telah mengesahkan daftar keanggotaan dan susunan Panitia Khusus (pansus) RUU tentang penyelenggaraan pemilu. Keputusan tersebut didapat setelah masing-masing fraksi menyerahkan daftar nama-nama anggota pansus ke pimpinan dewan.

“Keanggotaan Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ini adalah berdasarkan usulan fraksi. Apakah susunan dan keanggotaan Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dapat disetujui” tanya Fadli. “Setuju...!” Jawab seluruh hadir di Rapat Paripurna.

Adapun susunan keanggotaan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu adalah Arif

# Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Komplek Parlemen

"Berilah aku sepuluh pemuda, maka akan aku guncang dunia" merupakan slogan dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno untuk menunjukkan kehebatan dari seorang pemuda. Hal itulah yang kemudian dikutip oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrowi dalam sambutan peringatan hari Sumpah Pemuda yang dibacakan oleh Sekjen DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Sudarsono di upacara peringatan hari Sumpah pemuda di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (28/10).

“ Saya berharap slogan itu tidak hanya menjadi jargon semata, melainkan juga filosofi akan sebuah sumpah pemuda yang harus terus diteladani dalam kehidupan sehari-hari,” ujar inspektorat utama DPR RI, Setyanta Nugraha saat dimintai pendapatnya tentang peringatan hari sumpah pemuda.

Jika kemudian Nachrowi menyontohkan CEO Gojek, Nadhiem Makarim menjadi salah seorang pemuda yang berani merubah paradigma dengan terobosan baru. Maka Setyanta Nugraha atau yang biasa disapa Toto ini berharap perubahan paradigma lewat inovasi atau terobosan baru yang sarat akan ide-ide kreatif ini juga dapat diteladani oleh seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Hal itu semata untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap

dewan dalam rangka mendukung kinerja anggota DPR RI.

"Kalau tadi sempat dicontohkan CEO Gojek sebagai pemuda yang berhasil melakukan sebuah perubahan

itu sebagai sebuah terobosan baru dari seorang pemuda untuk menerobos satu sisi dalam kemandegan atau stagnasi moda transportasi yang telah ada selama ini. Maka inovasi dan ide-ide kreatif



Suasana Upacara Hari Sumpah Pemuda di Komplek Parlemen

paradigma, meski pada awalnya ada pro dan kontra dari inovasi yang dikeluarkannya. Tapi saya melihat hal

seperti inilah yang harus terus dikembangkan terutama oleh institusi pemerintah atau lembaga negara, tentu semuanya untuk kepentingan masyarakat luas. Begitu juga harapan saya terhadap seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk dapat melakukan perubahan paradigma dalam mengoptimalkan pelayanan terhadap

dewan yang semata-mata untuk mendukung kinerja anggota DPR RI,"paparnya. ■

Wibowo, Erwin Moeslimin Singaraju, Trimedy Panjaitan, Diah Pitaloka, Esti Wijayanti dan Sirmadji dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dari Fraksi Golkar adalah Rambe Kamarulzaman, Agung Widiyantoro, Hetifah, Ahmad Zaki Siradj dan Agun Gunanjar. Dari Fraksi Gerindra yakni Ahmad Riza Patria, Hendro Hermono, Nizar Zahro, Supratman Andi Agtas.

Selain itu, Fraksi Demokrat mengajukan nama Edhie Baskoro Yudhoyono, Didik Mukrianto dan Fandi Utomo. Fraksi PAN mengajukan Yandri Susanto, Totok Daryanto dan Viva Yoga Mauladi.

Adapun Fraksi PKB mengajukan

Lukman Edy dan Neng Eem Marhamah.

Fraksi PKS mengajukan Al Muzzamil Yusuf dan Sutriyono. Adapun Fraksi PPP mengajukan Reni Marlianawati dan Ahmad Baidowi. Serta Tamanuri dan Dr. Muchtar Luthfi A. Mutty dari Fraksi Nasdem dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk mewakili Fraksi Hanura.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan dengan telah disetujuinya susunan anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu maka saat ini sudah dapat menjalankan tugas dan kegiatannya. "Dengan telah disahkan daftar keanggotan



Pimpinan DPR RI

dan susunan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, maka kini sudah dapat melakukan tugas-tugasnya," tutupnya. ■

(Ayu), Foto: Jeyadi/br

(hsmp), Foto: Kresna/br

## Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT DI

Munculnya dugaan praktek kecurangan yang dilakukan PT. Dirgantara Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan bagi beberapa anggota Komisi VI DPR RI. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat lanjutan membahas kinerja perusahaan dan kinerja keuangan serta Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (27/10).

Pihak ketiga dalam pemasaran pesawat-pesawat yang dilakukan PT. Dirgantara Indonesia menjadi alasan kuat terkait indikasi praktek kecurangan perusahaan tersebut. "Ini yang kita kejar tadi bahwa kenapa harus memakai pihak ketiga untuk memasarkan, padahal mereka punya Direktur Niaga yang tugasnya adalah memasarkan. Tapi Direktur Niaga ini tidak berfungsi malah memakai pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk mereka dengan memberi nilai yang cukup fantastis yaitu 5% - 7%," ungkap Darmadi Duriyanto, anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Darmadi juga mengatakan, bahwa rendahnya kinerja PT. DI dan besarnya *fee* untuk penjualan yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut dapat dianggap sebagai tindakan gratifikasi. "Ini yang menjadi pertanyaan kita supaya mereka itu bisa menjawab karena tidak boleh dalam

Undang-Undang pemberian *fee* kepada pihak ketiga oleh Badan usaha Milik Negara (BUMN). Karena itu melanggar peraturan yang ada dan bisa dianggap sebagai gratifikasi. Itulah yang kemudian kita juga pertanyakan kepada mereka," tambahnya.

Indikasi lain yaitu adanya praktek kecurangan pihak ketiga karena alamat lokasi dan nomor telepon yang serupa antara perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra PT. DI. "Lokasi dalam satu blok ruko yang sama hanya blok yang beda dan nomor telepon serta nomor faks yang hampir sama ini menimbulkan kecurigaan. Artinya ada dua perusahaan yang pemiliknya diduga sama. Jadi ini semakin menambah kecurigaan, makanya Komisi VI melakukan pengawasan terhadap hal-hal tersebut supaya tidak berlanjut dikemudian hari dan ini harus mereka pertanggung jawabkan," tegasnya.

Politisi asal Dapil III DKI Jakarta



Anggota Komisi VI Darmadi Duriyanto

tersebut mendesak agar PT. DI melakukan transparansi dalam melaporkan keuangan kepada Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak terjadi lagi tindak kecurangan. Perusahaan ini diharapkan menaikkan penjualan sehingga bisa berdiri sendiri tanpa adanya lagi suntikan PMN. ■

(eva.mp), Foto: Rumi/br

## DPR RI Harapkan Bandara yang Dikelola Kemenhub Tak Kalah Pelayanannya dengan AP

Komisi V DPR RI mengapresiasi pembangunan terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai antisipasi lonjakan penumpang 10-15 persen/tahun. Kini bandara di Kalteng telah melayani sekitar 1 juta penumpang per tahunnya.

Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI Lasarus di sela-sela peninjauan ke lokasi bandara baru, Senin (31/10) menyatakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) pembangunan ini adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bukan BUMN.

"Ini gambaran bahwa ke depan beberapa bandara akan dikelola Kemenhub. Karena itu, pelayanannya diharapkan tidak kalah dengan Angkasa Pura (AP) sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa lebih banyak," ujarnya.



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau pembangunan terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya

Menurut Lasarus, akan sayang pemerintah yang membangun dengan biaya besar lalu swasta yang mengelola. Dia berharap, dengan dikelola oleh pemerintah secara profesional maka PNBP masuk tanpa ada potongan dan langsung masuk kas negara. Apalagi lanjut dia, PNBP dari Kemenhub cukup meningkat setiap tahunnya.

Tim Komisi V DPR RI melihat bangunan terminal baru cukup megah dan permanen, saat ini tengah dikerjakan apron dan 3 buah garbarata serta pengerjaan terminal parkir. Pada saat yang sama juga sedang dikerjakan rekontruksi landasan pacu/*run way* sebab selama ini bergelombang.

Diharapkan rekontruksi sepanjang 2.500 m yang menelan biaya Rp 150 miliar ini selesai tahun depan. Tim Kunker selengkapny Lasarus dan Sudjadi (F-PDIP), Agati Sulie Mahyudin (F-PG), Andi Iwan D. Aras dan Saiful Raayid (F-Gerindra), Willem Wandik (F-PD), Sungkono (F-PAN) dan Sigit Sosiantomo (F-PKS). ■

(mp), Foto: Mastur/br

## Sekjen DPR RI Kenalkan Konsep Parlemen Modern

Sekretariat Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany mengenalkan konsep parlemen modern kepada gabungan instansi pemerintahan Pakistan. Konsep parlemen modern merupakan visi DPR RI demi terwujudnya lembaga perwakilan yang modern, berwibawa dan transparansi.

Demikian dijelaskan Sekjen DPR RI saat menerima beberapa instansi pemerintahan Pakistan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/10).

Dalam kesempatan itu, turut hadir Deputy Persidangan Damayanti, Erum Adnan (Inland Revenue Service), Mohammad Sohail Rajput (Pakistan Administrative Service), Ahmad Hassan (Government of KPK Province), Zeenat Hussai Bangash (Postal Group), Farooq Hameed Shaikh (Government of Punjab Province), Qazi Habib Ur Rehman (Foreign Service of Pakistan), Saud Irman Ahmed (Pakistan Custom Service), Majid Baig (Pakistan Railways).

"Saya jelaskan periode ini parlemen Indonesia menargetkan parlemen modern. Indikatornya adalah kerja parlemen



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany berdialog dengan delegasi Instansi pemerintahan Pakistan

berdasarkan transparansi dan teknologi informasi," jelas Win, sapaan akrab Winantuningtyas.

Disebutkan Win, proses kerja berbasis transparansi ini akan memudahkan masyarakat mengakses semua kinerja anggota dewan secara *real time*.

Disamping itu, salah satu representasi instansi pemerintah Pakistan Ahmad Hassan juga menyoroti mekanisme *check and balances* antara DPR RI dan Pemerintah. Sebab, sistem parlemen Pakistan cukup berbeda, dimana anggota Parlemen Pakistan merupakan anggota Kabinet.

Menanggapi hal itu, kepada representasi pemerintah Pakistan, Win menyampaikan mekanisme proses *check and balances* yang dilakukan oleh DPR RI bersama Pemerintah, baik dari segi anggaran, pengawasan, maupun legislasi.

Ia memberikan contoh, ketika Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat pejabat publik, maka DPR RI akan melakukan *fit and proper test* terlebih dahulu. "Kemudian dalam pelaksanaan fungsi legislasi, di konstitusi diatur bahwa DPR RI memiliki kekuasaan membentuk UU tetapi harus dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah. Itulah fungsi *check and balances*," tutur Win. ■

(arni)Foto: Jeyadi/hr

## DPR Minta IAIN Ambon Penuhi Syarat Alih Status

Komisi VIII DPR RI minta Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN Ambon) untuk memenuhi syarat dasar alih status jika ingin menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Maluku Achmad Mustaqim menanggapi adanya keinginan dari civitas akademika IAIN Ambon terkait alih status menjadi UIN.

"Alih status itu memang sudah menjadi hak setiap kampus untuk melihat, menilai, dan

menginventarisir apa yang sepatutnya harus menjadi persyaratan," kata politisi dari Fraksi Persatuan Pembangunan saat pertemuan tim dengan Civitas Akademika IAIN, di Kampus IAIN Ambon, Senin (31/10).

Tentunya persyaratan tersebut, lanjutnya, tidak sekedar persyaratan faktual saja. Misalnya harus memiliki mahasiswa sekian atau fakultas sekian. Jadi bukan hanya persyaratan administrasi saja.

"Tentunya yang paling tahu adalah seluruh civitas akademika di sini untuk menginventarisirnya," pungkasnya.

Pada pertemuan yang dipimpin Rektor IAIN Ambon tersebut, ia bertanya kepada Civitas Akademika, siapa yang bisa memberikan jawaban tiga *value* utama IAIN untuk menjadi UIN.

Ia menambahkan, sudah menjadi

kewajiban DPR mendorong Pemerintah pusat. Sebagai Koordinator Anggota Komisi VIII di Badan Anggaran DPR (Banggar), Ia selalu mengutamakan perlunya *value* untuk menjadi UIN.

Dia juga minta kepada seluruh Civitas Akademika yang hadir untuk memantapkan dulu keinginan alih status. "Yakinkan dulu dan buktikan bahwa itu ada *value* yang bisa diperjuangkan. Kalau itu tidak ada, mohon maaf kami tidak bisa memperjuangkannya," tegasnya.

Karena menurutnya, salah satu kata kunci di Banggar DPR adalah harus bisa meningkatkan produk aktiviti. Jadi semua aspek pembiayaan, ia menginfokan di 2017 itu ada dana desa-desa sebesar 25,8 trilyun yang bisa digeser-geser di Banggar tapi harus memiliki dua syarat yaitu syarat pertama harus produk aktiviti yang berarti harus ada *value*. Syarat kedua harus ada persetujuan DPR RI. ■

(66) Foto: Suci/hr

## Irtama Sambut Baik Penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI menyambut baik penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan di Gedung DPR RI. Hal ini dinilai penting agar karyawan paham bagaimana proses pengadaan barang dan jasa yang benar dan tidak bermasalah dikemudian hari.

Pihaknya berharap kegiatan ini bisa memberikan hasil maksimal dan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan negara nantinya. Karena untuk menjadikan sebuah lembaga yang efektif, efisien, *good goverment* dan *clean goverment* diawali dari bagaimana proses pengadaan barang dan jasa yang *akuntable*.

"Saya berharap pendidikan dan pelatihan yang diberikan ini, bisa membuat staf yang bertugas dalam mengelola keuangan negara ini nantinya lebih memahami tugas pokoknya dalam melakukan pengadaan barang dan jasa," kata Setyanta Nugraha di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/10).

Pembekalan ini dinilai Irtama penting karena diketahui 40 persen anggaran di lingkungan Sekretariat dan Badan Keahlian Dewan berkaitan dengan barang dan jasa, dan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan 80 persen permasalahan ada di pengadaan barang dan jasa.

"Diberikan pembekalan ini, karena kita tahu sebagian besar kegiatan di lingkungan kita ini adalah pengadaan barang dan jasa, dan 80 persen masalah yang ditemukan BPK sebagai parameter kita ada di pengadaan barang dan jasa, oleh karena itu dengan pembekalan ini diharapkan teman-teman paham bagaimana

aturan main yang benar dalam melakukan pengadaan barang dan jasa," kata Toto sapaan akrabnya.

Acara yang berlangsung empat hari ini diawali dengan pemberian motivasi kepada peserta. Adapun peserta yang mengikuti pembekalan ini adalah hampir seluruh unit yang ada di lingkungan Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian Dewan

pengadaan barang dan jasa," lanjutnya,

Diakhir sambutan, Irtama memberikan kata mutiara kepada para peserta yaitu 'Biasakan yang benar bukan benarkan yang biasa'. Hal ini bertujuan untuk membangun dan mengubah kultur baru di dalam lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan, agar para peserta selalu biasakan budaya kerja yang benar dan diharapkan bisa menjadi salah satu pelopor untuk meningkatkan integritas DPR RI.

"Ini adalah kalimat bijak yang menjadi pegangan kita dimanapun kita berada, tidak hanya di lingkungan kedinasan tetapi juga di lingkungan kita berinteraksi," katanya.

Ditempat yang sama, Djohan Gazali selaku *motivator* menyampaikan kepada peserta untuk menghadapi ujian yang diperlukan adalah berpikir positif, bahwa semua peserta yang mengikuti pembekalan akan lulus ujian pada hari Kamis.

"Perlu ditanamkan di pikiran bahwa 'Insya Allah saya pasti lulus ujian sertifikasi'. Pikiran positif dan biasakan hidup positif, ini penting ditanamkan karena sesungguhnya kekuatan imajinasi melebihi kekuatan logika, jadi tanamkan saja dipikiran dan dituliskan 'Saya pasti lulus ujian, Kamis', " ujarnya. ■



Inspektur Utama Setyanta Nugraha bersama Tim LPKN

termasuk unsur Pengawas Internal yaitu Inspektorat Utama.

"Diawali dengan motivasi agar teman-teman lebih tekun dan yakin untuk bisa lulus dalam ujian nanti yang diselenggarakan hari Kamis, karena saya berharap semua bisa lulus ujian," katanya.

"Adanya pengawas internal diikutsertakan dalam kegiatan ini untuk mengawasi dan sebagai *partner* dalam pelaksanaan barang dan jasa nantinya, sehingga wajib dan penting bagi pengawas untuk memahami bagaimana proses di dalam

## Legislator Ikut Awasi Birokrasi dan ASN untuk Tak Berpihak dalam Pilkada DKI

Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan akan terus mengawasi untuk memastikan bahwa tidak ada birokrasi di DKI Jakarta yang melakukan keberpihakan terhadap calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta mendatang.

“Pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Pak Soni Sumarsono ini merupakan orang terpilih, terseleksi dan memiliki rekam jejak yang baik sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Dan pergantian tersebut merupakan hal yang sewajarnya. Disini saya juga akan terus mengawasi dan memastikan tidak ada PNS yang melakukan *manuver* politik praktis. Dan tidak ada birokrasi yang melakukan keberpihakan terhadap calon tertentu,” ungkap Arteri sesaat setelah Sidang Paripurna, Senayan Jakarta, Jumat (28/10).

Untuk itu lanjut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pihaknya akan bekerjasama dengan ASN dan KSN untuk ikut mengawasi PNS. Tidak hanya itu, ia juga akan memastikan Plt Gubernur DKI Jakarta yang baru saja resmi menggantikan Gubernur dan Wakil Gubernur petahana (yang tengah mencalonkan diri kembali) ini untuk tidak melakukan kebijakan, keputusan dan kewenangan yang menguntungkan salah satu pihak.

“Plt Gubernur DKI Jakarta nantinya tidak akan melakukan kebijakan, keputusan dan kewenangan yang akan

menguntungkan salah satu calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan Pilkada DKI Jakarta ini nantinya juga tidak akan melakukan kebijakan, keputusan atau kewenangan yang akan menguntungkan salah satu kandidat Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan pilkada serentak dengan undang-undang yang baru ini dapat lebih menyempurnakan proses demokrasi di negara kita tercinta ini,” pungkasnya. ■

(Ayu), Foto: Rizka/hr



Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan

## Gubernur NTT Berharap DPR RI Beri Dukungan Anggaran

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya berharap DPR RI memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan di NTT. Hal itu dikemukakannya saat menerima Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (31/10).

Menurut Frans Lebu Raya, kunjungan DPR RI ke provinsi ini merupakan bentuk perhatian terhadap upaya pembangunan yang tengah dilakukan di Nusa Tenggara Timur.

“Dengan melihat langsung kondisi daerah pasti anggota DPR RI memahami dengan jelas masalah dan kebutuhan-kebutuhan di daerah, sehingga nanti dalam pembahasan program dan anggaran diharapkan dapat memberikan dukungan yang signifikan untuk Nusa Tenggara Timur,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Frans atas nama Pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI bersama Gubernur NTT

mengatakan, DPR RI dan Pemerintah memberikan perhatian besar kepada pembangunan NTT, terutama sektor yang terkait dengan kemanusiaan dan agama yang menjadi karakter di NTT.

“Mudah-mudahan intervensi program pada masa akan datang juga akan lebih baik lagi,” katanya. Termasuk juga kondisi obyektif di lapangan, yang menurutnya NTT merupakan daerah bencana, sehingga Komisi VIII akan mengintervensi anggaran di hampir 22 kabupaten.

“Gubernur NTT tadi juga mengharapkan supaya jangan hanya sekedar kunjungan tetapi ada *follow up* pada tahun-tahun yang akan datang termasuk intervensi anggaran tahun 2017,” imbuhnya.

Ali Taher menambahkan, pada bidang sosial akan ada Program Keluarga Harapan (PKH), e-warung, Usaha Keluarga Sejahtera (UKS) yang terus menerus dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. ■

(as), Foto: Agung/hr

## Di Sorong, Komisi V DPR RI Tinjau Sejumlah Infrastruktur

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur pendukung untuk rakyat maupun perhubungan di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Selasa (1/11).

Infrastruktur yang dimaksud adalah Bandara Domine Eduard Osok, pembangunan Sistem Air Baku Kota dan Kabupaten Sorong, Pelabuhan Arar, Pengaspalan Jalan Nasional menuju pelabuhan dan peninjauan ke pelabuhan Sorong.

Kunjungan pertama ke Bandara Domine Eduard Osok. Menurut Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI Michael Wattimena, DPR RI mendapat informasi dari pihak pengelola bandara yang mengusulkan adanya *taxiway* paralel dan yang menyangkut terminal.

"Saya mendengar Bandara Domine Eduard Osok ini menurut kabar akan diserahkan ke angkasa pura, hal ini tentunya akan lebih memberikan nilai tambah bandara ini," jelas Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena.



*Tim Kunker Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur di Kabupaten Sorong, Papua Barat*

Setelah dari bandara, dilanjutkan meninjau pembangunan sistem air baku kota kabupaten Sorong, di distrik Makbun.

Lalu berlanjut ke pelabuhan Arar, dimana pelabuhan yang sejak difungsikan ini berdampak positif bagi warga sekitar pelabuhan dan rakyat sorong

Dengan berfungsinya pelabuhan Arar berarti di Sorong sudah ada dua pelabuhan besar yang disinggahi kapal barang dan penumpang ukuran besar.

Pelabuhan lain yang ditinjau Komisi V DPR RI adalah pelabuhan Sorong yang tengah diperpanjang agar bisa menampung lima kapal sandar dan mengurangi antrian kapal melakukan aktivitas bongkar muat.

Tim Kunker diikuti anggota Komisi V lainnya yakni : Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Daniel Mutaqien Syafiudin (F-PG), Hamka B Kady (F-PG), Ade

Rezeki Pratama (F-Gerindra), Moh. Nizar Zahro (F-Gerindra), Agung Budi Santoso (F-PD), Anton Sukartono Suratno (F-PD), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Fathan (F-PKB), Soehartono (F-Nasdem), Djoni Rolindrawan (F-Hanura). ■

(nt), Foto: Nitabr

## Komisi V DPR RI Harap Bandara Muara Bungo Buka Keterisoliran

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia berharap Bandar Udara Muara Bungo dapat membuka keterisoliran masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah Sumatera bagian tengah.

Demikian dikatakan Yudi, saat Tim Kunspek Komisi V DPR RI bersama Bupati Bungo, dan jajaran Kemenhub melakukan peninjauan ke Bandara Muara Bungo, Kab. Bungo, Provinsi Jambi, Kamis (27/10).

"Bandara Muara Bungo ini adalah salah satu bandara yang kita hadirkan untuk sebuah kabupaten, dan keberadaannya setelah dimulai penerbangan dari pertama sejak tahun 2012, kemudian diganti kembali ditahun 2016, ternyata apresiasi dan minat masyarakat luar biasa untuk menggunakan bandara ini," jelas Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menambahkan, dengan keberadaan bandara ini, DPR RI

menginginkan investasi yang sudah tertanam di bandara bisa terselesaikan dengan cepat dan pada gilirannya bisa dioperasionalkan secara maksimal.

"Dalam arti penerbangannya sudah bisa ekonomis setiap hari dengan tentunya destinasi yang beragam," terang Yudi.

Lalu menurut Yudi, bandara ini juga menjadi tantangan pemda (Pemerintah Daerah), untuk bagaimana bisa menghidupkan potensi-potensi orang bisa berkunjung ke Muara Bungo dan sekitarnya.

"Saya yakin dengan adanya bandara ini bisa memicu pertumbuhan itu sendiri. Dan setelah ada pertumbuhan, perlu juga dilipat

gandakan lagi dengan beberapa kegiatan sosial ekonomi yang bisa memicu kembali masyarakat untuk datang ke Muara Bungo dan daerah sekitarnya," harap politisi dari Fraksi PKS ini.

Yudi juga menilai, bahwa dirinya pun melihat kesungguhan pemda, ini terlihat, dimana pemda membangun terminal yang cukup megah, membangun *tower* untuk digunakan ATC, dan ternyata diketahui pula bahwa seluruh aset bandara juga telah diserahkan kepada Kemenhub.

"Walaupun meski secara administratif masih ada beberapa yang belum sempurna seperti sertifikat masih dalam pengurusan di BPN," lanjutnya.





Tim Kunspek Komisi V DPR RI tinjau Bandara Muara Bungo Buka Keterisolan di Jambi

Dan menurut Yudi, komitmen (pemdared) ini sudah terlihat, tinggal bagaimana pemerintah pusat menerima aset yang sudah

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota komisi V DPR RI yang telah berkunjung ke kabupaten Bungo

dilimpahkan bisa m e n j a w a langkah-langkah yang lebih cepat lagi agar bandara ini bisa beroperasi seperti bandara-bandara lainnya.

Sementara itu, Bupati Bungo Mashuri atas nama pemerintah kabupaten Bungo menyampaikan

beserta pihak kementerian perhubungan. "Dengan hadirnya para pemangku kepentingan ini, mungkin akan memperlancar pembangunan bandara yang ada di kabupaten bungo ini," harap Mashuri.

Kondisi Bandara Muara Bungo saat ini sudah cukup baik dan terus dilakukan perluasan, baik bangunan maupun perpanjangan runway.

Dengan kondisi yang ada sekarang, dimana runway bandara dengan panjang 1.800 meter sudah bisa dilandasi pesawat berbadan besar Boing 737 serie 500. Aktivitas pesawat baru empat kali dalam seminggu, dan dilayani hanya oleh satu maskapai penerbangan. ■

(nu), Foto: smat/hr

## Memajukan Pariwisata Sulut Harus Dimulai dari Pendidikan SDM

Untuk memajukan dunia pariwisata di Sulawesi Utara (Sulut), mesti dimulai dari pendidikan sumber daya manusianya (SDM). SDM pariwisata harus berkualitas dan mengerti kebutuhan dunia pariwisata.

Demikian mengemuka saat Tim Kunker Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemda Sulut. Komisi X mengapresiasi Pemda Sulut, baik Pemprov maupun Pemkab/kota yang sangat peduli pada dunia pendidikan dan pariwisata. Harapan untuk memajukan pendidikan dan pariwisata harus sinergis dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pariwisata.

"Kementerian-kementerian ini sudah terikat komitmen bersama kami Komisi X untuk bersama-sama melakukan sinergisitas terhadap pembangunan kepariwisataan yang dimulai dengan dunia pendidikan, yaitu penyiapan SDM. Karenanya, kita mensyukuri adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah," kata Ketua Tim Kunker Ferdiansyah (F-PG) usai melakukan peninjauan lapangan, Senin (31/10).

Tim Kunker Komisi X mengunjungi 4 gedung sekolah, yaitu SDN 78 Manado, SMPN 4 Manado, SMKN I Airmadidi, dan SMAN I Airmadidi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini menjelaskan bahwa Komisi X telah membentuk Panitia Kerja (panja) sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.

"Dalam kunjungan ke sini pun, fokus pada sarana dan prasarana di SD, SMP, dan SMK yang ternyata masih banyak ruang kelas yang perlu direhabilitasi, baik ringan, sedang, maupun berat. Kami sudah inventarisasi untuk diteruskan dalam rapat dengan Kemendikbud, agar segera ditindaklanjuti," ujar Ferdi. Kerusakan berat ditemui di aula SMAN I Airmadidi yang merupakan bangunan lama yang sudah memerlukan renovasi total, khususnya pada atap.

Terkait dengan pendidikan untuk SDM cikal bakal pendukung pariwisata, Anggota tim kunker Junico Siahaan (F-PDI Perjuangan) menyoroti kurikulum yang diterapkan di SMKN I Airmadidi. "Saya lihat, tadi ada kelas di laboratorium bahasa dengan pelajaran bahasa Perancis, Inggris, dan Jepang. Ke depan, seharusnya



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau SMAN I Airmadidi dan SMK di Manado

diadakan bahasa Mandarin, karena tren turis sekarang dari negeri berbahasa mandarin seperti China, Hongkong, Macau. Apalagi, ada direct flight dari China mainland," ungkap politisi yang akrab dipanggil Nico ini.

Dengan demikian, di masa mendatang SDM pariwisata di Manado lebih siap menyambut tamu-tamu yang datang, baik dari domestik maupun mancanegara disertai pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas lainnya juga harus dilakukan untuk mengembangkan pariwisata di Manado. ■

(ray), Foto: Rizka/hr

# DPR RI Dorong Isu Kedaulatan Jadi Pemersatu IPU

DPR RI sebagai peserta dari *Islamic Group* di *Inter-Parliamentary Union* (IPU) mendorong agar isu kedaulatan menjadi pemersatu negara-negara peserta. Dorongan ini diperlukan sebagai kesamaan pandangan, lantaran parlemen negara-negara *Islamic Group* di IPU memiliki usulan yang berbeda terkait resolusi darurat yang diajukan di IPU.

**W**akil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Munawar mengusulkan ide pemersatuan itu saat menghadiri pertemuan *Islamic Group* di 135th IPU *Assembly and related meetings*, Switzerland, Minggu (23/10). Ia bahkan akan melobi lebih lanjut untuk mengkombinasikan isu kedaulatan dengan tantangan kemanusiaan yang saat ini dihadapi dunia.

Tiga usulan resolusi darurat pertama diusulkan oleh negara anggota PUIC yakni secara berturut turut: Suriah, Maroko, dan Arab Saudi. "Ketiga negara ini mengajukan resolusi darurat dengan motif berbeda-beda. Tetapi ada satu garis besar yang sama, yakni isu mengenai kedaulatan. Ini jadi kata kunci," jelas Rofi dalam rilis yang diterima Parlemen, Kamis (27/10)

IPU yang juga merupakan anggota *Parliamentary Union of OIC* (PUIC) diharapkan DPR RI, agar memiliki satu posisi yang sama dalam penegasan prinsip kedaulatan negara dari intervensi asing.

Dengan demikian, isu ini akan mendapatkan dukungan lebih luas dari sekitar 160 parlemen anggota IPU. Politisi PKS itu lebih lanjut menjelaskan bahwa Suriah memiliki kepentingan atas pemberlakuan sanksi ekonomi, yang kemudian berdampak pada HAM individu, termasuk pada pelanggaran bepergian. Sementara Saudi memiliki kepentingan atas langkah Kongres AS yang mengesahkan UU yang membolehkan warga AS menggugat Saudi atas tragedi 9/11.

"Sementara Maroko mengangkat isu utama PUIC yakni soal Palestina. Isu-isu ini berkaitan dengan bagaimana kita

sebagai negara nasional membentengi kedaulatan kita dan kemudian untuk tidak tunduk pada asing. Di sisi lain, banyak dari kita memiliki tantangan kemanusiaan dalam beragam konflik yang terjadi seperti di Suriah, Palestina dan lain sebagainya," tandasnya.

Memiliki satu suara bagi *Islamic Group* menurut Rofi sangat penting, untuk menunjukkan kebulatan tekad umat Islam dalam sebuah isu. Ia juga menandakan pentingnya agar *Islamic Group* baik dalam IPU maupun di PUIC memiliki sinergi mekanisme kerja dan konektivitas yang

baik



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar

dengan organisasi kerja sama Islam (OKI).

"Ini yang jadi catatan saya karena sejauh ini kerja PUIC berikut keputusannya tidak terhubung langsung dengan OKI. Perlu ada mekanisme lebih baik agar PUIC dan OKI dapat bersinergi," pungkasnya.

Saat ini, per 23 Oktober 2016, ada beberapa usulan resolusi darurat di IPU yakni:

Dampak negatif dari langkah-langkah ekonomi unilateral (unilateral coercive economic) terhadap hak asasi manusia dan kontradiksi antara negara konflik. Membantu memperkuat perdamaian dan keamanan Internasional melalui pengakuan Palestina sebagai negara yang layak, merdeka dan berdaulat dengan menempatkan Yerusalem Timur sebagai

ibu kota negara.

Peran Parlemen untuk mempertahankan kedaulatan dan ketahanan negara dalam subordinasi keadilan sosial untuk setiap negara, dan adopsi dari setiap peraturan perundang-undangan unilateral yang melanggar prinsip kedaulatan tersebut dianggap melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, perjanjian internasional maupun piagam PBB.

Menghormati pemisahan kekuasaan sebagai elemen penting dari sistem demokrasi dan jaminan parlemen sebagai lembaga yang berfungsi dalam menjalankan demokrasi.

Menjamin keamanan para imigran hingga tiba di negara tujuan, seperti krisis kemanusiaan di Aleppo (Suriah).

Bertanggung jawab untuk melindungi warga sipil, menjamin hak-hak asasi mereka dan tetap melindungi warisan lokal di wilayah perang dan krisis kemanusiaan di Syria, terutama di daerah Aleppo. ■

(BKSAP-ekowmp), foto: dok. ipks/br

## Fanatisme Pilkada Rawan Konflik

Fanatisme masyarakat dalam mendukung calon pemimpinnya di Pilkada serentak 2017 sangat rawan konflik. Untuk itu, Bawaslu dan KPU perlu menjunjung tinggi independensinya serta aparat pun perlu cermat melihat potensi konflik.

## Kepala BKD DPR RI Terima Kunjungan DPRD Jawa Timur

Kepala Badan Keahlian DPR RI K. Johnson Rajagukguk menerima kunjungan DPRD Provinsi Jawa Timur di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10). Dalam pertemuan itu membahas tentang tugas dan wewenang Badan Keahlian sebagai lembaga pendukung di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

“ Kita menerima kunjungan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan dalam pertemuan itu kita membicarakan mengenai keberadaan badan keahlian di DPR RI yang mereka nilai penting sebagai sistem pendukung, khususnya di dalam membentuk peraturan perundang-undangan,” kata Johnson.

Lebih lanjut, Johnson menjelaskan terkait keberadaan BKD di DPR RI mereka berharap dapat membentuk badan keahlian juga di DPRD. “Tidak tahu apa namanya nanti seandainya bisa dibentuk badan keahlian di daerah. Tapi ini penting untuk mendukung tugas DPRD dan memperkuat karena badan keahlian diisi oleh tenaga profesional, tenaga yang secara fungsional dan khusus membidangi tiga fungsi yaitu, legislasi, anggaran, pengawasan,” ujarnya.

Johnson berharap, keinginan DPRD Jawa Timur untuk membentuk sistem pendukung bisa terealisasi, agar mereka semakin kuat. “Mudah-mudahan nanti di DPRD, apakah di provinsi maupun

kabupaten dan kota pembentukan sistem pendukung seperti BKD bisa terealisasi, karena sesungguhnya semakin kuat sistem pendukung maka DPRD nya juga akan semakin baik,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Ketua rombongan DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmed Heri menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kehangatan Kepala BKD yang telah menerimanya beserta rombongan. “Kehadiran kami ingin mengetahui tentang Badan Keahlian yang kami nilai ini cukup efektif dalam membantu tugas DPR RI,” ujarnya.

Pihaknya berharap, BKD bisa diturunkan ke DPRD karena dengan adanya badan keahlian, semua tugas terkait dengan penyusunan peraturan daerah bisa terbantu. Apalagi, tugas seorang politisi sangat banyak dengan badan keahlian diharapkan bisa menunjang tugas-tugas DPRD.



Kepala Badan Keahlian DPR RI K. Johnson Rajagukguk

“Saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah daerah agar bisa terealisasi. Kita mencoba melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah karena konteksnya adalah sesuai dengan kemampuan daerah, kalau pemerintah daerah Provinsi Jatim mampu kita dorong adanya badan keahlian yang bisa mendampingi tugas-tugas legislator yang ada di provinsi dan kabupaten kota,” tuturnya. ■

(rnm), Foto: Arief/br

“ Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menyampaikan hal tersebut dalam diskusi mingguan Dialektika Demokrasi bertajuk “Siap Menang Siap Kalah” di Media Center DPR RI, Kamis (27/10). Semua pihak diimbau mampu mengantisipasi konflik. Penyelenggara Pemilu harus menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam Pilkada.

Yang penting lagi, sambung politisi PKB itu, politik uang harus disingkirkan dalam Pilkada serentak. “Penyelenggara Pilkada harus dapat memastikan tidak ada politik uang, serta netralitas PNS, TNI, dan Polri,” serunya.

Hadir pula sebagai pembicara komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, komisioner KPU Feri Kurnia Rizkiyansyah, dan Direktur Perludem Titi Angraini. Menurut Daniel, banyak pasangan calon



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dalam diskusi Dialektika Demokrasi

yang melakukan blusukan ke tengah masyarakat yang di luar agenda kampanye. Ini perlu diawasi, agar kampanye calon kepala daerah lebih *fair* dan tertib.

Sementara itu, Titi mengungkapkan, daerah yang perlu diwaspadai dalam Pilkada serentak 2017 adalah Provinsi Aceh. Mantan Kombatan GAM dan petahana saling

mencalonkan diri. Potensi konfliknya cukup besar. Selain Aceh, Pilkada di Banten juga perlu perhatian. Pengawasan perlu masif dilakukan di Banten, lantaran banyak politisasi birokrasi dan politik uang.

Namun, yang menggembarakan, sambung Titi, tak ada diskursus penundaan Pilkada 2017. “Dalam konteks ini kita sudah matang,” ucapnya. Pilkada kali ini selain lebih matang, juga lebih optimis dan penuh harapan. Sementara berkaca pada Pilkada serentak 2015, konflik justru dipicu oleh dualisme kepengurusan partai. Kini, konflik partai relatif sudah mereda. Jadi, Pilkada tidak lagi diganggu oleh konflik internal partai. ■

(sc), Foto: Jayadi/br

## Komisi III Soroti Pengawasan Orang Asing di Palangkaraya

Anggota tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR RI Daeng Muhammad menyoroti permasalahan imigrasi, terutama terkait pengawasan orang asing saat Rapat dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (31/10).

Jujur saja saya tertarik ketika mendapatkan penjelasan dari Kakanwil bahwa ada kelemahan di imigrasi kita berkaitan dengan pengawasan orang asing. Jangan-jangan ini terkait dengan adanya bebas visa di Cina. Artinya, ini menjadi evaluasi bagi kita,"



Anggota Komisi III DPR RI Daeng Muhammad

imbuh politisi asal F-PAN itu.

Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus punya rasa nasionalisme dan harga diri yang tinggi. Jadi, seharusnya tidak dengan mudah memberikan peluang-peluang terjadinya permasalahan terkait imigrasi tersebut. "Saya meminta kepada Kakanwil dalam hal ini sebagai penggerak semua komponen di Kemenkum dan HAM untuk melihat permasalahan-permasalahan tersebut secara cermat. Ini menyangkut persoalan harga diri sebagai bangsa," tegasnya.

Lebih lanjut, politisi asal dapil Jawa Barat itu menambahkan agar kebijakan dalam penegakkan hukum yang diambil, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Harapannya, jangan sampai ada permasalahan besar yang tidak terdeteksi. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III Yayat Y. Biaro. Persoalan tersebut, katanya, merupakan agenda

strategis, baik di tataran isu maupun fakta.

"Harus ada laporan yang konkrit, sehingga ini menjadi tugas kita untuk mengevaluasi apakah persoalan tersebut merupakan ancaman bagi negara kita ke depan. Jangan sampai menjadi seperti fenomena gunung es, yang tampak permasalahan di permukaan sedikit, tapi ratusan yang tidak terdeteksi," jelasnya.

Kunker Komisi III ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa (F-Gerindra/dapil Banten). Kemudian diikuti oleh anggota Komisi III DPR RI dari F-PDI Perjuangan Ichsan Soelistio (dapil Banten), Risa Mariska (dapil Jawa Barat), Yayat Y. Biaro (dapil Banten), dan Iwan Kurniawan (dapil Kalimantan Tengah). Anggota lainnya yang turut serta adalah Rohani Vanath (F-PKB/dapil Maluku), TB. Soenmandjaja (F- PKS/dapil Jawa Barat), dan Daeng Muhammad (F-PAN/dapil Jawa Barat). ■

(tra)/n. Foto: Tiara/br

## Komisi III DPR RI Pertanyakan Pendidikan Napi Anak di Bengkulu

Pendidikan bagi warga binaan anak menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Lapas Kelas IIA Bengkulu.

“Saya mempertanyakan model pembinaan napi (warga binaan) anak. Karena sekalipun ada di blok sendiri, terpisah dari blok dewasa, namun saat acara khusus di lapas, pasti mereka bertemu dan berinteraksi. Sebut saja ketika sholat Jumat, antara napi anak dan dewasa pasti bertemu. Dan ini nantinya pasti akan menimbulkan dampak tersendiri,” ujar anggota Komisi III DPR RI, Dossy Iskandar saat melakukan kunjungan kerja ke lapas Bengkulu, Senin (31/10).

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPR RI lainnya. Didik

Mukrianto misalnya, mempertanyakan pendidikan bagi napi anak. Pasalnya meski pengadilan telah menetapkan mereka bersalah, namun sejatinya masa depan anak-anak tersebut masih panjang.

"Napi anak walaupun sudah dinyatakan bersalah, tapi masa depan mereka masih panjang. Dan saya dengar sendiri tadi, diantara mereka malah ada yang mengaku masih ingin melanjutkan sekolah. Pertanyaannya, apakah lapas menyediakan model pendidikan untuk mereka? Pemerintah telah menyiapkan anggaran 20 persen dari APBN untuk pendidikan



Anggota Komisi III DPR RI Dossy Iskandar

yang tersebar di beberapa kementerian, termasuk untuk napi anak di lapas," kata Didik.

Menjawab hal tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, Dewa Putu Gede mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan instansi terkait membuat program pendidikan kejar paket A sampai C untuk napi anak. ■

(Ayu)/n. Foto: Ayu/br

## Komisi III DPR RI Serap Aspirasi Lembaga Penegak Hukum di Banda Aceh

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI menyerap aspirasi para mitra kerja lembaga penegak hukum di Banda Aceh, Senin (31/10).

Pertama, kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, dengan Kejaksaan Tinggi, yang mengeluh biaya penanganan perkara penegakkan hukum yang masih minim. Misalnya, ada kejaksaan yang menangani perkara di daerah terpencil mesti menempuh jarak sekitar 8 jam. Sedangkan biaya operasionalnya tidak sebanding.

Selanjutnya, dikalahkan proses mutasi pejabat utama di lingkungan kejaksaan yang belum dilaksanakan, padahal rata-rata sudah menempati posisi selama empat tahun.

Kedua, lanjut Trimedya, dengan Kapolda Aceh, Pihaknya menitipkan 21 pilkada (20 Kabupaten, 1 Gubernur) supaya dapat berjalan dengan baik dan netralitas kepolisian dijaga.

Lalu, yang ketiga dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dengan anggaran yang didapat Rp1,3 triliun untuk seluruh kabupaten kota ini memang



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan

sangat minim.

Apalagi, tambahnya, "kalau dibandingkan dengan anggaran Polri Rp72 triliun, dengan dana sebesar itu saja belum terlalu leluasa," ujar Politisi F-PDI Perjuangan.

Menurut Trimedya, BNNP harus sadar dan kreatif, "saya sampaikan, ada Gubernur di Sulawesi Utara yang mau membantu fasilitas sarana dan prasarana BNNP. Kepala BNNP harus kreatif sepanjang itu dibuat payung hukumnya, sehingga tidak akan menjadi masalah di kemudian hari," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy, mengatakan, aspirasi dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Aceh terkait *over* kapasitas di lapas, mereka masih membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sedangkan pada APBN-P kemarin saja hanya mendapat alokasi dana 16 milyar untuk 5 wilayah.

"Maka, kami di Komisi III DPR RI ingin berupaya sedemikian rupa, untuk membantu anggaran khususnya di Aceh. Apalagi Aceh dijadikan sebagai daerah otonomi khusus (otsus), tentu ada kekhususan," kata Politisi F-PKS itu. ■

(Aki), Foto: Jaka/hr

## Minat Masuk PTS di Sulteng Makin Menurun

Minat para siswa untuk masuk perguruan tinggi swasta (PTS) di Sulawesi Tengah (Sulteng) makin menurun. PTS pun kekurangan mahasiswa. Hal ini terungkap saat tim kunjungan kerja (Kunker) Komisi X berkunjung ke Sulteng, Senin (31/10).



Tim Kunker Komisi X meninjau PTS di Sulteng

Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX Sulawesi Andi Niartiningih menuturkan, peminat PTS di Sulteng terus mengalami penurunan disebabkan adanya penerimaan mahasiswa baru yang begitu besar

di perguruan tinggi negeri (PTN). Pihaknya, mengkritik kebijakan PTN yang melakukan penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa pintu, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi PTS untuk menerima mahasiswa baru.

Sejumlah PTS bidang kebidanan dan keperawatan juga masih kekurangan tenaga pengajar. Itu karena di Sulteng tidak ada perguruan lanjutan magister untuk bidang tersebut. Masyarakat setempat harus melanjutkan studinya ke Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi, kondisi di Makassar pun dibatasi dengan kuota. Padahal, daerah yang paling dekat dengan Palu untuk melanjutkan pendidikan tinggi hanya di Makassar.

Akibatnya, banyak dosen kebidanan dan keperawatan yang masih lulusan S1 dan D4.

Sutan Adil Hendra Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang memimpin kunjungan kerja ke Sulteng tersebut, ikut merasa prihatin atas kondisi ini dan perlu dicarikan solusi tepat untuk PTS Sulteng. Ini bisa menjadi catatan penting untuk dibawa ke raker dengan menteri terkait. Tim Kunker Komisi X didampingi Kadisdik, Kadis Pemuda dan Olahraga, Kadis Pariwisata dan Bekraf, serta Kepala Perpustakaan Sulteng, langsung menuju Universitas Tadulako dan diterima Rektor Tadulako M. Basri dan jajarannya di Gedung IT Center.

Sutan menjelaskan bahwa Komisi X DPR RI periode 2014-2019 pernah melakukan kunker ke Sulteng pada 23-27 Februari 2015, "Salah satu kesimpulan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Sulteng berjalan cukup baik dengan kondisi APK pada tahun 2014 untuk Perguruan Tinggi 13%. Kondisi ini, perlu secara terus menerus ditingkatkan dan perlu diiringi dengan perbaikan sarana dan prasarana," kata Sutan. ■

(Aki), Foto: Eke/hr

## DPR RI Telah Sahkan 17 Rancangan Undang-undang

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, sejauh ini DPR RI telah mengesahkan 17 Rancangan Undang-Undang (RUU) sejak Januari hingga Oktober 2016. Dari 17 RUU, 9 adalah RUU prioritas 2016 dan 8 merupakan RUU Kumulatif Terbuka. Sementara 19 RUU dalam tahap pembicaraan tingkat satu, 3 RUU telah selesai harmonisasi di Baleg, 4 RUU dalam tahap harmonisasi, dan 15 RUU dalam tahap penyusunan.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers terkait kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 hingga dengan bulan Oktober 2016 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10).

"Pada awal tahun sidang 2016 DPR RI bersama Pemerintah telah menetapkan sebanyak 40 RUU yang akan dibahas pada tahun 2016. Namun, memang pada perkembangannya, terdapat beberapa RUU tambahan yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas 2016, sehingga secara keseluruhan menjadi 50 RUU dan 30 RUU merupakan inisiatif DPR RI," jelas politisi Gerindra itu.

Menurutnya, demi mempercepat kinerja legislasi, Baleg selalu melakukan koordinasi dengan Komisi maupun Panitia Khusus untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam pembahasan RUU.

"Perkembangan Baleg dalam melakukan harmonisasi sudah maksimal dilakukan, namun menyangkut kinerja legislasi DPR RI ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh," ungkap legislator Dapil Sulteng.

Diakuinya, beberapa faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan proses pembahasan RUU menjadi lambat. Di internal DPR RI, capaian kinerja legislasi sangat bergantung pada tingkat kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga diperlukan kemampuan profesional

anggota dan staf secara kolektif serta mekanisme pembentukan UU itu sendiri.

Selain itu, pencapaian kinerja legislasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh DPR RI. Meskipun DPR RI mempunyai kekuasaan membuat undang-undang, namun pembahasannya harus dilakukan bersama pemerintah.



*Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas*

Artinya, semua undang-undang harus dibahas bersama DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan, sehingga terkadang hal ini berimplikasi pada ketepatan waktu pembahasan RUU. Terlebih lagi jika, antara DPR RI dan Pemerintah memiliki perbedaan yang signifikan dalam substansi RUU tersebut.

"Proses pembahasan UU tidak semata dilakukan oleh DPR RI, karena harus dilakukan persetujuan bersama dengan Pemerintah. Nah, kadang kala terjadi *deadlock* dalam pembahasannya karena ada keinginan dewan mengatur sesuatu namun

pemerintah tidak setuju," tandasnya.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3, Baleg telah melakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan pelaksanaan UU.

Adapun UU tersebut ialah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU terkait Kebakaran Hutan dan Lahan, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Untuk memberikan informasi terhadap masyarakat luas, Baleg berencana akan melaporkan progres perkembangan pembahasan RUU disetiap akhir masa sidang. "Saya berharap badan legislasi bisa istiqomah menyampaikan pertanggungjawabannya dalam rangka perbaikan bangsa dan negara," harap politisi dari dapil Sulawesi Tengah. ■

*(ans.np) Foto: Nuefuroji/br*



*Tim Kunker Komisi VIII DPR RI bersama Civitas Akademika IAIN Padang dan Kanwil Kemenag Sumbar*

## Komisi VIII DPR RI Harap IAIN IB Tidak Kehilangan Jati Dirinya

Komisi VIII DPR RI berharap, IAIN Imam Bonjol (IB) Padang, tidak kehilangan jati dirinya bila sudah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Pendidikan Islam (Pendis) jangan sampai dikesampingkan.

**H**al ini diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Linda Megawati (F-PD) saat berdialog dengan civitas akademika IAIN IB Padang dan jajaran Kanwil Kemenag Sumbar, di Kampus IAIN IB Lubuklintah, Padang, Senin (31/10). "Jadi, intinya, jangan sampai Pendis dikesampingkan atau meninggalkan identitas IAIN IB selaku Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)," tegasnya.

Menurutnya, banyak IAIN yang ketika berubah menjadi UIN, justru ditinggal peminatnya karena kurang berminat dengan Pendisnya. Ia memberi contoh UIN di Jakarta. Jangan sampai menimpa UIN yang ada di Padang. "Kalau ini sampai terjadi di Padang, mau dibawa ke mana tokoh-tokoh ulama atau para generasi penerus untuk menyebarkan Pendis," pungkasnya.

Sementara hal senada disampaikan pula Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak. Dia berharap, alih status dari institut ke universitas jangan menghilangkan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan keislaman. "Titahnya harus dipertahankan sebagai dunia pendidikan yang menjunjung tinggi tridharma,

seperti pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat," ungkapnya.

Fungsi IAIN IB sebagai lembaga pencetak intelektual Islam, diakuinya sangat fundamental. Mahasiswanya yang sedang kuliah dan menjadi alumni berperan sebagai pengawal moral yang akan mengabdikan di tengah-tengah masyarakat. Menurut politisi Partai Golkar ini, "UIN ke depan harus berpikir profesional, andal, dan teruji. Apalagi, negara kita adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa," tutupnya.

Dalam dialog tersebut, Rektor IAIN IB Eka Putra Wirman bersama Kakanwil Kemenag Sumbar Salman K Memed menegaskan, pihaknya sudah siap dengan berbagai syarat untuk menjadi UIN. Proses demi proses telah dilalui, termasuk dukungan Kanwil Kemenag Sumbar bersama jajarannya. Apalagi, beberapa waktu lalu visitasi telah dilakukan oleh Sekneg. "Informasinya, helat Dies Natalis ke-50 UIN, Inshaallah terealisasi," pungkasnya. ■

*(itu) Foto: ikuwanti/br*

# JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344  
@dpr\_ri    f DPR RI    @DPR\_RI    DPR RI



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dipimpin Samsuniang saat pertemuan dengan civitas akademika IAIN Ambon, Senin (31/10) Foto : Suciati/hr

Komisi X DPR RI tinjau kegiatan keterampilan siswa/i SMPN 14 Palu dan SMKN 1 Palu dipimpin Mudjib Rohmat, Sulteng, Selasa (01/11) Foto : Eka hindra/hr



Tim Penyusun Buku Kinerja Dewan, Sekretariat Jenderal DPR RI, dipimpin Karopim Drs. Helmizar mengadakan kegiatan diskusi dengan dua Perguruan Tinggi, UIN Maulana Malik Ibrahim dan Universitas Brawijaya dalam rangka memperoleh masukan, Malang, (3-4/11) Foto : Istimewa